

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - OPD).

Rencana Kerja-OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu guna menyusun rencana kerja yang berupa program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas. Dengan begitu baik program maupun kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik nantinya.

### 1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- j. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- k. Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2018 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2018. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2018 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun 2018 beserta rencana Anggaran Tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi OPD berdasarkan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) untuk menyusun program dan kegiatan tahunan.
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-OPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra-OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada kegiatan Penanganan Aduan Masyarakat. Kegiatan penanganan aduan masyarakat dengan target 12 aduan terealisasi 4 aduan. Tidak tercapainya target pada penanganan aduan karena jumlah aduan yang masuk hanya ada 4, sedangkan capaian untuk kegiatan ini adalah pada jumlah aduan yang masuk.
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
    2. Penyediaan Jasa Keuangan
    3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
  - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi kinerja
    1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
    2. Penyusunan Laporan Keuangan
    3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
    1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
  - d. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
    1. Pelayanan dan Fasilitas Investasi
    2. Penyelenggaraan Pameran Investasi
    3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
    4. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

5. Penyusunan Data dan Informasi Penanaman Modal
  6. Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Penanganan Aduan Masyarakat
  2. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
    - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      1. Pelayanan Administrasi Perizinan
      2. Survey Perizinan

Hal ini disebabkan adanya sistem perizinan jemput bola dan adanya pengawasan berupa surat peringatan terhadap perizinan yang sudah habis masa berlakunya, serta meningkatnya investasi di bidang perumahan.

Dengan melihat hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2016 tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 97,33 % secara komprehensif tingkat pencapaian atau implikasinya terhadap tingkat pencapaian Renstra-OPD sangat tinggi.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2016 disajikan dalam table 2.1 berikut:

Tabel 2.1

## Evaluasi terhadap hasil RKPD DPMPT tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Ket.
			4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4								
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
<b>1.16</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>																
<b>1.16.1.16.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100</b>	<b>836.885.846</b>	<b>81</b>	<b>162.505.022</b>	<b>100</b>	<b>162.032.575</b>	<b>99,99</b>	<b>162.022.099</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>181</b>	<b>324.527.121</b>	<b>180,56</b>	<b>38,78</b>	
1.16.1.16.01.01.01	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Persuratan, jasa pegawai tidak tetap, peralatan kantor, ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka. (bulan)	60	416.566.546	12	67.296.580	12	77.520.025	12	77.517.200	100	100,00	24	144.813.780	40	34,76	
1.16.1.16.01.01.02	Penyediaan Jasa Keuangan	Honorarium petugas penata usahaan keuangan dan barang (bulan)	60	79.568.000	12	13.680.000	12	15.486.550	12	15.484.550	100	99,99	24	29.164.550	40	36,65	
1.16.1.16.01.01.03	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Makanan dan minuman Rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan)	60	340.751.300	12	81.528.442	12	69.026.000	12	69.020.349	100	99,99	24	150.548.791	40	44,18	
<b>1.16.1.16.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>1.057.217.139</b>	<b>90</b>	<b>526.238.711</b>	<b>100</b>	<b>228.029.500</b>	<b>92,74</b>	<b>211.482.689</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	<b>183</b>	<b>737.721.400</b>	<b>182,6</b>	<b>69,78</b>	
1.16.1.16.01.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	20 buah Kursi rapat, 20 buah Kursi kerja, 1 buah Almari arsip, 1 buah almari, 2 buah papan nama kantor, 3 buah Filling kabinet, 4 unit Kipas angin, 2 unit AC, 6 buah Meja Rapat dan 1 buah papan pengumuman (unit)	50	254.048.800	7	287.644.500	60	76.451.500	60	72.963.650	100	95,44	67	360.608.150	134	141,94	
1.16.1.16.01.02.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan 7 Motor, 3 mobil, 12 komputer, 9 printer, 4 laptop, 3 scanner, 1 LCD, 1 ordinat, 3 mesin ketik, 3 kamera, 3 AC (unit)	237	803.168.339	188	238.594.211	49	151.578.000	49	138.519.039	100	91,38	237	377.113.250	100	46,95	Belanja telepon, air, dan listrik dan pajak kendaraan dinas : sesuai kebutuhan.
		Sarana Prasarana Perkantoran(bulan)	60		48		12		12		100		60		100		
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor(bulan)	60		48		12		12		100		60		100		
<b>1.16.1.16.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD</b>	<b>Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)</b>	<b>100</b>	<b>78.235.000</b>	<b>80</b>	<b>24.170.803</b>	<b>100</b>	<b>16.650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>16.650.000</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>180</b>	<b>34.121.803</b>	<b>180</b>	<b>43,61</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Ket.
1.16.1.16.01.03.02	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Pegawai yang memiliki pemahaman PTSP atau Promosi atau Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal (Orang)	30	61.750.000	5	17.471.803	9	16.650.000	9	16.650.000	100	100,00	14	34.121.803	46,67	55,26	
	Pengadaan seragam PSH	Pakaian PDH PNS		16.485.000		6.699.000											
<b>1.16.1.16.01.04</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD</b>	<b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)</b>	<b>100</b>	<b>58.214.150</b>	<b>81</b>	<b>12.603.575</b>	<b>100</b>	<b>13.865.500</b>	<b>99,94</b>	<b>13.856.625</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>181</b>	<b>26.460.200</b>	<b>180,5</b>	<b>45,45</b>	
1.16.1.16.01.04.01	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Rencana kerja SKPD (dokumen)	5	18.183.650	4	2.793.975	1	3.073.400	1	3.071.400	100	99,93	5	5.865.375	100	32,26	
1.16.1.16.01.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan capaian kinerja keuangan (dokumen)	10	21.635.700	8	4.696.725	2	5.166.700	2	5.164.325	100	99,95	10	9.861.050	100	45,58	
1.16.1.16.01.04.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan evaluasi dan pengendalian bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD (dokumen)	95	18.394.800	76	5.112.875	19	5.625.400	19	5.620.900	100	99,92	95	10.733.775	100	58,35	
<b>1.16.1.16.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Capaian pemantauan dan pengawasan investasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>1.620.791.650</b>	<b>91</b>	<b>336.085.266</b>	<b>100</b>	<b>411.311.150</b>	<b>96,58</b>	<b>397.233.910</b>	<b>96,58</b>	<b>96,58</b>	<b>188</b>	<b>733.319.176</b>	<b>187,7</b>	<b>45,24</b>	
1.16.1.16.01.05.01	Pelayanan dan Fasilitasi Investasi	Terfasilitasi dan terlayannya investasi (Layanan Investasi)	24	194.199.350	24	41.182.571	24	42.889.600	24	42.589.172	100	99,30	48	83.771.743	200	43,14	
1.16.1.16.01.05.02	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terinformasikannya Potensi Investasi (Event)	4	788.390.800	4	144.513.068	4	164.814.800	4	153.136.161	100	92,91	8	297.649.229	200	37,75	Belanja sewa stand pameran menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan penyelenggara
1.16.1.16.01.05.03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Terkelolanya sistem Informasi perijinan(SPIPISE) dan investasi(subdomain DPMPPT, Jogja invest dan GIS) (sistem)	4	192.606.750	4	27.462.550	4	64.038.250	4	63.104.250	100	98,54	8	90.566.800	200	47,02	
1.16.1.16.01.05.04	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	Terawasinya Perizinan (ijin)	135	125.375.800	135	34.510.050	135	46.570.500	135	46.228.225	100	99,27	270	80.738.275	200	64,40	
		Tersedianya data LKPM di 25 perusahaan(dokumen)	25		25		25		25		100		50		200		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016 (%)		Ket.
1.16.1.16.01.05.05	Penyusunan Data dan Informasi Penanaman Modal	Tersedianya booklet (booklet)	500	143.449.800	5	47.095.250	500	50.628.200	500	50.079.500	100	98,92	505	97.174.750	101	67,74	
		Tersedianya leaflet(Leaflet)	3.000		3.000		3.000		3.000		100		6.000	-	200		
1.16.1.16.01.05.06	Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Terjalannya kerjasama penanaman modal (dokumen)	2	176.769.150	2	41.321.777	2	42.369.800	2	42.096.602	100	99,36	4	83.418.379	200	47,19	Anggota tim mengikuti Diklatpim sehingga honor tim kembali ke kas daerah.
<b>1.16.1.16.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian peningkatan pelayanan perijinan terpadu (%)</b>	<b>94</b>	<b>1.018.604.020</b>	<b>94</b>	<b>225.608.525</b>	<b>94</b>	<b>279.266.950</b>	<b>98,11</b>	<b>274.000.750</b>	<b>104,4</b>	<b>98,11</b>	<b>192</b>	<b>499.609.275</b>	<b>204,1</b>	<b>49,05</b>	
1.16.1.16.01.06.01	Survey Perizinan	Terlaksananya survey perizinan (pemohon)	2.050	656.176.345	2.050	123.190.200	2.050	134.601.000	2.746	133.768.700	134	99,38	4.796	256.958.900	234	39,16	
1.16.1.16.01.06.02	Penanganan Aduan Masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat (Aduan)	12	24.722.500	12	5.669.575	12	7.781.000	4	5.390.000	33,33	69,27	16	11.059.575	133,3	44,73	Menyesuaikan jumlah aduan yang masuk
1.16.1.16.01.06.03	Pelayanan Administrasi Perizinan	Tersedianya Sticker (lembar)	200	157.875.200	200	83.436.100	200	120.440.000	200	119.314.400	100	99,07	400	202.750.500	200	128,42	
	107,1238095	Tersedianya Plat IMB(lembar)	1.280		1.280		1.280		1.280		100		2.560		200		
		Terbitnya perizinan(ijin)	3.500		3.500		3.500		4.248		121,4		7.748		221,4		
1.16.1.16.01.06.04	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	Tersedianya leaflet informasi perijinan (leaflet)	500	179.829.975	500	13.312.650	500	16.444.950	500	15.527.650	100	94,42	1.000	28.840.300	200	16,04	Anggota tim cuti melahirkan sehingga honor yang kembali ke kas daerah
		Tersosialisasikannya peraturan perundangan tentang pelayanan perijinan ( 280 orang ) dengan prosentase perijinan SIUP dan TDP (%)	280		280		280		280		100		560		200		
		Tersedianya spanduk (Buah)	5		5		5		5		100		10		200		
Rata-rata capaian kinerja(%)											98,28	96,69			135,21	54,29	
Predikat Kinerja											ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM				4.669.947.805		1.287.211.902		1.111.155.675		1.075.246.073		587		1.622.439.799		292	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM											98,94	97,89			185,91	48,65	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)	Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Dievaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2016 (%)	Ket.
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM							ST	ST		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitasi dan kemudahan investasi, jemput bola perizinan, pengawasan perizinan dan meningkatnya investasi di bidang perumahan.										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : sarana dan prasarana yang kurang memadai										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana PTSP										

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dapat dilihat pada Table 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun:	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal disektor /bidang usaha unggulan daerah.	100	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerja sama kemitraan antara usaha Mikro kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat Kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional.	Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPKM fasilitasi Pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	100	40	40	40	40	40	40	40	40	

Berdasarkan data pada tabel di atas, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah tercapai 100 %, target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tercapai 100 %.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal, pelayanan, pengaduan, pengawasan, pengelolaan data dan informasi, serta kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) mempunyai tantangan sebagai berikut :

- (1) Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo
- (2) Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (*high cost investment*)
- (3) Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri
- (4) Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada tumpang tindih
- (5) Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal
- (6) Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima
- (7) Dinas Penanaman Modal yang baru terbentuk tahun ini serta kantor yang berada di dua lokasi menyebabkan kinerja dinas kurang efektif
- (8) Tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- (1) Mega proyek di Kulon Progo berupa pembangunan pelabuhan perikanan dan rencana pembangunan bandara internasional, pabrik pengolahan pasir besi
- (2) Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi
- (3) Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri
- (4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
- (5) Perkembangan teknologi informasi
- (6) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima
- (7) Potensi kawasan bedah menoreh
- (8) Pencanaan kawasan Industri Sentolo

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Rentra OPD**

Penyusunan Rencana Kerja-OPD disamping mengacu pada Rentra-OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Review Rentra OPD terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran OPD dengan melihat perkembangan perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran OPD.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD SKPD Tahun 2018**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		6	12
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>189.455.448</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>220.594.525</b>	
1	Penyediaan jasa/peralatan perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Jasa Perkantoran ( jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap, rekrutmen pegawai non ASN 2 orang ) dan peralatan kantor atau alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka ).	12	Bulan	85.272.028	Penyediaan jasa/peralatan perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Jasa Perkantoran ( jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap, rekrutmen pegawai non ASN 2 orang ) dan peralatan kantor atau alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka ).	12	bulan	102.883.725	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12	Bulan	28.254.820	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12	bulan	25.686.200	
3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	75.928.600	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi	12	bulan	92.024.600	
II	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>89,84</b>	<b>%</b>	<b>282.835.800</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>89,84</b>	<b>%</b>	<b>368.337.400</b>	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Tersediannya 4 unit UPS,1 set meteran laser digital dan kacamata fokus, 6 buah helm survey, 1 buah kamera digital, 1 buah scanner F4, 1 buah	24	Unit	116.100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Tersediannya 1 unit gedung PTSP, 1 unit monil survey, 4 unit UPS,1 set meteran laser digital dan kacamata fokus, 6 buah helm survey, 1 buah	26	unit	179.663.000	

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		6	12
			modem, 1 buah server komputer, 1 buah papan tulis, 2 buah hardisk eksternal, 2 unit sepeda motor, 1 unit GPS, 2 unit printer						kamera digital, 1 buah scanner F4, 1 buah modem, 1 buah server komputer, 1 buah papan tulis, 2 buah hardisk eksternal, 2 unit sepeda motor, 1 unit GPS, 2 unit printer				
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	aset ,sarana prasarana perkantoran, peralatan pemeliharaan gedung kantor	58;12;12	Unit, bulan, bulan	166.735.800	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	aset ,sarana prasarana perkantoran, peralatan pemeliharaan gedung kantor	58;12;12	Unit, bulan, bulan	172.024.400	
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD</b>	<b>20</b>		<b>18.315.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>16.650.000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	kemampuan dan pengetahuan SDM	6	Orang	18.315.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	kemampuan dan pengetahuan SDM	6	orang	16.650.000	
IV	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>19,03</b>	<b>%</b>	<b>15.252.050,00</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program SKPD</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>19,03</b>	<b>%</b>	<b>15.251.500</b>	
1	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	rencana kerja SKPD	1	Dokumen	3.380.740	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	rencana kerja SKPD	1	dokumen	3.380.500	
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	laporan capaian kinerja keuangan	2	Dokumen	5.683.370	Penyusunan Laporan Keuangan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	laporan capaian kinerja keuangan	2	dokumen	5.683.250	

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		6	12
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	laporan evaluasi dan pengendalian bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD	19	Dokumen	6.187.940	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	laporan evaluasi dan pengendalian bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD	19	dokumen	6.187.750	
V	<b>Program Pelayanan Investasi</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Cakupan realisasi investasi</b>	<b>61,86</b>	<b>%</b>	<b>370.914.088</b>	<b>Program Pelayanan Investasi</b>	<b>Lingkup Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Cakupan realisasi investasi</b>	<b>61,8571</b>	<b>%</b>	<b>223.143.000</b>	
1	Pelayanan penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Pelayanan penanaman modal	24	Investor	92.862.468	Pelayanan penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Pelayanan penanaman modal	24	investor	84.420.425	
2	Pengembangan penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Identifikasi pengembangan infrastruktur	1	Dokumen	32.594.320	Pengembangan penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Identifikasi pengembangan infrastruktur	1	dokumen	29.631.075	
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	identifikasi profil investasi	2	Dokumen			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	identifikasi profil investasi	2	dokumen		
4	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	forum bisnis	2	Kali	245.457.300	Penyelenggaraan promosi penanaman modal	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	forum bisnis	2	kali	223.143.000	
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Pameran	4	Kali			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	pameran	4	kali		
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	bahan promosi (promotion kit) : booklet/ leaflet/ CD/peta potensi/banner/goodybag/maket	1	Paket			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	bahan promosi (promotion kit) : booklet/ leaflet/ CD/peta potensi/banner/goodybag/maket	1	paket		



No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		6	12
VI	Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Capaian Pemantauan dan Pengawasan Investasi	74,74	%	105.223.305	Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Capaian Pemantauan dan Pengawasan Investasi	74,74	%	95.657.250	
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website DPMPT	5	Sistem	59.400.000	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website DPMPT	5	sistem	53.999.750	
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	sosisalisasi sistem informasi PM	35	Perusahaan			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	sosisalisasi sistem informasi PM	35	perusahaan		
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	database PM dan perijinan	1	Dokumen			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	database PM dan perijinan	1	dokumen		
2	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Penanaman Modal;	25	Perusahaan	45.823.305	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Penanaman Modal;	25	perusahaan	41.657.500	
			Perizinan	135	Izin				perizinan	135	izin		
VII	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Capaian peningkatan pelayanan perizinan	100	%	339.563.510	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Capaian peningkatan pelayanan perizinan	100	%	318.192.800	
1	Survey Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey	1750	Pemohon	162.867.210	Survey Perizinan	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey	1750	pemohon	144.661.000	

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		6	12
2	Penanganan aduan dan advokasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Terselesaikannya aduan	10	Aduan	27.500.000	Penanganan aduan dan advokasi	Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Terselesaikannya aduan	10	aduan	25.000.000	
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	survey IKM	3	Kali			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	survey IKM	3	kali	-	
		Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Sosialisasi pelayanan perijinan, leaflet informasi perizinan, spanduk	280	Orang			Lingkup Kabupaten Kulon Progo	Sosialisasi pelayanan perijinan, leaflet informasi perizinan, spanduk	280	Orang	-	
				1000	Leaflet					1000	leaflet		
				10	Spanduk					10	spanduk		
3	Pelayanan administrasi perizinan		pelayanan perizinan ;	3000	Izin	149.196.300				3000	izin		
			petugas front office	2	Orang								
	<b>Jumlah Eks BAU</b>					<b>505.858.298,00</b>						<b>6.860.586.270,00</b>	
	<b>Jumlah Kegiatan</b>					<b>815.700.903,00</b>						<b>815.700.903,00</b>	
	<b>Jumlah Total</b>					<b>1.321.559.201,00</b>						<b>7.676.287.173,00</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan mekanisme perencanaan, usulan kegiatan dimulai dari musyawarah di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Demikian juga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga melalui mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bukan OPD yang membidangi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan umum masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu jarang sekali menerima usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil musrenbang maupun forum musyawarah lainnya. Dengan demikian usulan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih pada mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal

Visi dan misi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Kebijakan Nasional	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya anggaran promosi</li><li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li><li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li><li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterbatasan lahan untuk investasi</li><li>• Tingginya harga lahan untuk investasi</li><li>• Kepastian tata ruang untuk investasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia</li><li>• Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo</li><li>• Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor</li></ul>

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan tidak terlepas dari Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) . Tujuan dan sasaran Rencana Kerja tidak berbeda dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), karena tujuan dan sasaran Renja merupakan Implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).

Visi yang ingin di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah **“Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global, serta pelayanan perizinan yang prima”**.

Pernyataan visi tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

- **Berdaya Saing** : dalam arti persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.
- **Berwawasan Global** : Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”. Suatu entitas, betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya, begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia. Jadi, dengan memiliki wawasan global, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mampu mengembangkan potensi yang dimiliki tidak hanya dalam wilayahnya saja, melainkan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain, khususnya dibidang investasi.
- **Pelayanan Perizinan Prima** : Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat, transparan dan pasti.

Untuk mencapai visi, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.
2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan

Misi mewujudkan peningkatan daya saing daerah : peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan

promosi secara intensif dan berkelanjutan. Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan diperlukan untuk mendukung meningkatnya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal.

Misi mewujudkan pelayanan prima perizinan : peningkatan investasi perlu didukung dengan Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas di bidang investasi, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujud pelayanan prima.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing investasi daerah.
2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) adalah :

1. Meningkatnya nilai investasi
2. Meningkatnya pelayanan perizinan

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
				2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Cakupan realisasi nilai investasi	29,05	73,44	82,29	91,15	100,00
2	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,30	77,82	78	79	80

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 untuk urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018**

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
2.12.2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%					220.594.525			
2.12.2.12.01.01.01.26	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Jasa Perkantoran ( jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap, rekrutmen pegawai non ASN 4 orang ) dan peralatan kantor atau alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka ).	12 bulan	Dukungan sebesar 7 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran.	100 %	102.883.725	113.172.098	Sedang Berjalan	Rekrutmen 4 orang non ASN : 1 orang administrasi persuratan, 1 orang sopir dan 2 orang <i>front office</i> pelayanan perizinan
2.12.2.12.01.01.01.27	Penyediaan jasa keuangan	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Honorarium petugas penata usahaan keuangan dan barang (9 orang)	12 bulan	Dukungan sebesar 7 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran.	100 %	25.686.200	28.254.600	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.28	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	Dukungan sebesar 6 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran.	100 %	92.024.600	101.227.060	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
2.12.2.12.01.01.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	100%					368.337.400			
2.12.2.12.01.01.11.01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Tersediannya 1 unit gedung PTSP, 1 unit mobil survey, 4 unit UPS, 1 set meteran laser digital dan kacamata fokus, 6 buah helm survey, 1 buah kamera digital, 1 buah scanner F4, 1 buah modem, 1 buah server komputer, 1 buah papan tulis, 2 buah hardisk eksternal, 2 unit sepeda motor, 1 unit GPS, 2 unit printer	26 unit	Dukungan sebesar 50 % terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	179.663.000	205.824.190	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.11.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik (lampu pijar dll), alat dan bahan kebersihan	12 Bulan	Dukungan sebesar 50 % terhadap capaian peningkatan sarana prasarana perkantoran.	100 %	172.024.400	206.793.840	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
							Terpeliharanya Laptop : 8 unit, notebook : 1 unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15 unit, AC : 4 unit, Kipas angin : 2 unit, Printer : 16 unit, genset : 1 unit	58 Unit						
							Pembayaran listrik, air, Telepon untuk DPMP	12 bulan						
<b>2.12.2.12.01.01.12</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>				<b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</b>	<b>100%</b>					<b>15.251.500</b>			
2.12.2.12.01.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Penyusunan perencanaan kinerja SKPD.	3 dokumen	Dukungan sebesar 35 % terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja.	100 %	3.380.500	3.718.814	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.02	Penyusunan laporan keuangan	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Dokumen laporan kinerja keuangan	2 dokumen	Dukungan sebesar 30 % terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja.	100 %	5.683.250	6.251.575	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD	
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
2.12.2.12.01.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP, Laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi penyelenggaraan investasi perizinan dengan stakeholder terkait.	19 dokumen		Dukungan sebesar 35 % terhadap capaian perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja.	100 %	6.187.750	6.806.470	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.13	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD</b>				<b>Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD</b>	<b>100%</b>						<b>16.650.000</b>			
2.12.2.12.01.01.13.03	Pendidikan dan pelatihan non formal	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati	6 Orang		Dukungan sebesar 100 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD.	100 %	16.650.000	18.315.000	Sedang Berjalan	
2.12.2.12.01.01.32	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</b>				<b>Capaian peningkatan pelayanan perijinan</b>	<b>100%</b>						<b>318.192.800</b>			

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
					terpadu									
2.12.2.12.01.01.32.05	Survey perizinan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey	1750 pemohon	Dukungan sebesar 35 % terhadap capaian peningkatan pelayanan perijinan.	100 %	144.661.000	159.127.100	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.10	Penanganan aduan masyarakat dan advokasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Spanduk	5 spanduk	Dukungan sebesar 30 % terhadap capaian peningkatan pelayanan perijinan	100 %	25.000.000	27.500.000	Sedang Berjalan	
							Terselesainya Aduan Masyarakat	10 Aduan						
							Sosialisasi pelayanan perijinan	280 orang						
							Leaflet informasi perijinan	1000 leaflet						
							Survey aduan	3 kali						
2.12.2.12.01.01.32.11	Pelayanan administrasi perizinan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kabupaten			Cetak plat IMB	1000 buah	Dukungan sebesar 35 % terhadap capaian peningkatan pelayanan perijinan	100 %	148.531.800	163.384.980	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
							Stiker	2532 lembar						
							Petugas Front Office	2 Orang						
							Pelayanan Perizinan	3000 Ijin						

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
							Blangko perijinan	14 macam						
<b>2.12.2.12.01.01.53</b>	<b>Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi</b>				<b>Capaian pemantauan dan pengawasan investasi</b>	<b>74,74%</b>					<b>95.657.250</b>			
2.12.2.12.01.01.53.01	Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			database PM dan perijinan	1 dokumen	Dukungan sebesar 29,9 % terhadap capaian pemantauan dan pengawasan investasi.	100 %	53.999.750	59.399.725	Sedang Berjalan	
							Sosialisasi sistem informasi PM	35 perusahaan						
							SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website DPMPT	5 system						
2.12.2.12.01.01.53.02	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Perizinan	135 Izin	Dukungan sebesar 44,84 % terhadap capaian pemantauan dan pengawasan investasi	100 %	41.657.500	45.823.250	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
							Penanaman Modal	25 Perusahaan						
<b>2.12.2.12.01.01.54</b>	<b>Program Pelayanan Investasi</b>				<b>Capaian realisasi investasi</b>	<b>61,86%</b>					<b>337.194.500</b>			
2.12.2.12.01.01.54.03	Penyelenggaraan promosi penanaman	Peningkatan kualitas dan kontinuitas	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan	Lingkup Kabupaten			Goodybag	500 buah	Dukungan sebesar 20,41 %	100 %	223.143.000	2445.457.300	Sedang Berjalan	

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				JENIS KEGIATAN	SKPD
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
	modal	produk lokal	Pendapatan Masyarakat							terhadap capaian pelayanan penanaman modal				
							Partisipasi promosi bersama BKPM DIY (Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional) Investasi)	2 event						
							Pameran (Aitis; Invesda Ekspo, Kulon Progo Ekspo)	3 event						
							forum bisnis	1 kali						
							Booklet	500 booklet						
							Leaflet	3000 Leaflet						
2.12.2.12.01.01.54.02	Pengembangan penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			Database pengembangan infrastruktur	1 dokumen	Dukungan sebesar 18,56 % terhadap capaian pelayanan penanaman modal	100 %	29.631.075	32.594.100	Sedang Berjalan	
2.12.2.12.01.01.54.01	Pelayanan penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal	Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	Lingkup Kabupaten			pelayanan penanaman modal	24 investor	Dukungan sebesar 22,89 % terhadap capaian pelayanan penanaman modal	100 %	84.420.425	92.862.440	Sedang Berjalan	

Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pogram pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran</li> <li>2. Penyediaan jasa keuangan</li> <li>3. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi</li> </ol>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</li> <li>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Perkantoran</li> </ol>
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan kinerja OPD</li> <li>2. Penyusunan Laporan Keuangan.</li> <li>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja</li> </ol>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan</li> </ol>
Program Pelayanan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>2. Pengembangan Penanaman Modal</li> <li>3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</li> </ol>
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Perizinan</li> <li>2. Penanganan Aduan Masyarakat dan advokasi</li> <li>3. Pelayanan Administrasi Perizinan</li> </ol>
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan</li> </ol>

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja-OPD merupakan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, bahan Koordinasi dan evaluasi yang berisi rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta rencana anggaran dalam satu tahun anggaran sebagai implementasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam JM – OPD dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok OPD serta dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja-OPD didasarkan pada program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maupun RKPD, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja-OPD setiap Tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta untuk mengembangkan aspirasi sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan apresiasi sebagai catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan data potensi investasi yang akurat dan terkini, untuk mendukung peningkatan dan pengembangan sistem Informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan sumber daya, sarana prasarana penunjang investasi,
6. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan memberikan jaminan kepastian kepastian hukum dan kepastian berusaha, insentif dan kemudahan, terbuka, akuntabel bagi pengusaha lokal PMA maupun PMDN dengan dukungan personil, sarana dan prasarana serta dana yang memadahi
7. Peningkatan Promosi dan Kerjasama yang tepat efektif dan efisien untuk meningkatkan daya tarik investasi

8. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Investasi untuk mewujudkan pelayanan prima
9. Peningkatan pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan.

Wates, 2017

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KULON PROGO

AGUNG KURNIAWAN, S.IP, M.Si  
NIP :19680805 199603 1 005